

MUI - DPRD DIY KOMITMEN PERKUAT RUANG DIALOG

Mahfud MD Optimis Pemilu 2024 Lebih Kondusif

YOGYA (KR) - Menteri Koordinator Hukum Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Prof Mahfud MD optimis Pemilu 2024 akan lebih kondusif dari hajat pemilihan umum sebelumnya. Kendati demikian sejak awal masyarakat juga diminta mengedepankan sikap menghormati dan menghargai setiap pilihan yang ditentukan.

Menurut Mahfud, pada Pemilu 2019 lalu tiga tahun sebelumnya sudah terjadi dinamika politik di masyarakat, baik yang sifatnya verbal hingga berdampak ke fisik. "Menurut saya Pemilu 2024 akan lebih damai karena tinggal empat bulan lagi penentuan calon itu kondisinya tenang tidak ada kekerasan fisik dan politik. Dulu tahun 2019, tiga tahun sebelumnya sudah bergelombang. Sekarang alhamdulillah semua berjalan aman dan damai," ungkapnya ketika menyampaikan orasi kebangsaan di DPRD DIY, Sabtu (15/7).

Orasi kebangsaan tersebut merupakan bagian dari halaqah menyambut Tahun Baru 1445 Hijriyah yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) DIY bekerja sama dengan DPRD DIY. Mahfud MD secara khusus diundang untuk

menyampaikan orasi guna memperkokoh rasa kebangsaan dalam menyambut Pemilu 2024. Selain dari kalangan ulama, cendekiawan muslim serta tokoh islam, sejumlah tokoh masyarakat dan agama di DIY juga turut hadir dalam kesempatan tersebut.

Lebih jauh Mahfud menjelaskan, masyarakat memiliki kebebasan dalam menentukan pemimpin pada Pemilu 2024. Perbedaan pemilihan dan dinamika yang terjadi harus disikapi dengan bijak dengan saling menghormati. Sedangkan kelak ketika sudah terpilih pemimpin hasil pemilu, maka tidak boleh lagi ada permusuhan dari yang sebelumnya berbeda pilihan.

Dirinya juga mengajak para aparat penegak hukum dan masyarakat untuk memahami pola kecurangan yang sering

terjadi pada proses pemilu, terutama ketika masa kampanye. Menurutnya, kegiatan menghasut masyarakat dengan cara tidak sehat dapat berimplikasi negatif pada proses demokrasi. Lebih dari itu, kampanye yang tidak berkualitas akan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga politik. "Tidak ada calon pemimpin yang sempurna. Semua memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Itu harus kita sadari bersama," tandasnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudianta ST, mengapresiasi kegiatan tersebut karena dapat menciptakan ruang dialog dan pemahaman yang lebih baik antara ulama, eksekutif, legislatif dan masyarakat umum. Pihaknya juga berkomitmen bersama MUI DIY untuk memperbanyak ruang dialog yang melibatkan masyarakat secara luas.

"Momentum diskusi memperingati Tahun Baru Islam kali ini menjadi ajang refleksi dan introspeksi diri serta menguatkan rasa kebangsaan. Mari kita jadikan tahun politik sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan dan membangun kebersamaan yang berlan-



KR-Ardhi Wahdan

Menko Polhukam RI (tengah) foto bersama usai orasi kebangsaan menyambut Tahun Baru 1445 H.

daskan pada semangat Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika," katanya.

Senada diungkapkan Ketua Umum MUI DIY Prof Dr Machasin MA. Dirinya menyebut MUI memiliki peran sebagai mitra pemerintah serta pelayan umat. Pemilu 2024 yang akan dihelat dalam waktu dekat merupakan hajat besar bersama yang harus berjalan dengan adil, damai dan kondusif. Oleh karena itu sejak

awal perlu ada kesadaran dari seluruh elemen masyarakat agar menghindari berbagai hal yang bisa memecah belah bangsa seperti menghasut, membuat dan menyebarkan berita bohong, dan lain sebagainya. "Perbedaan itu hal yang biasa. Sehingga rasa kebangsaan harus terus kita dipupuk agar semakin kokoh. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk itu," tandasnya. **(Dhi)-f**

Panglima Gepako Dukung Judicial Review Negara Tak Perlu Minta Maaf Kepada PKI

YOGYA (KR) - Panglima Gerakan Pasukan Anti Komunis (Gepako), Gandung Pardiman mendukung penuh upaya judicial review terhadap Inpres Nomor 2 tahun 2023, Keppres Nomor 17 tahun 2022, Keppres Nomor 4 tahun 2023 dan Keputusan Presiden nomor 4 tahun 2023.

Di dalam Inpres tersebut intinya bahwa negara mengakui kesalahan telah melakukan pelanggaran HAM berat atas peristiwa G30S/PKI tahun 1965 dan 1966. Sehingga negara akan menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga PKI. Selain itu negara akan memberikan imbalan ganti rugi.

Menurut Gandung, Inpres dan Keppres ini bertentangan dengan Tap MPRS 25 tahun 1966. "Saya mendukung penuh judicial review yang diajukan Anak-anak Jenderal (Purn) TNI Ahmad Yani. Secara yuridis Inpres dan Keppres ini bertentangan dengan Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966 di mana Partai Komunis adalah partai terlarang. Sampai sekarang Tap MPRS



KR-Istimewa

Panglima Gepako, Gandung Pardiman.

tersebut masih berlaku," tegas Gandung Pardiman dalam keterangan persnya, Minggu (16/7).

Gandung Pardiman menyatakan, negara tidak perlu minta maaf karena PKI telah melakukan pemberontakan dan melakukan pembunuhan terhadap para jenderal putera terbaik bangsa. Kekejaman PKI telah berlangsung berulang ulang sejak zaman kemerdekaan sampai tahun 1965 sebagai puncaknya. Menurut Gandung, Bangsa Indonesia beruntung ada sosok bernama Soeharto yang bertindak cepat menyelamatkan negara ini dari paham Komunis.

"Kalau tidak ada gerakan cepat dari Pak Harto yang waktu itu sebagai Pangkos-

trad, maka Indonesia menjadi negara Komunis dan Pancasila tinggal sejarah. Kita harus berterima kasih pada Pak Harto yang menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia dari komunis dan menegakkan NKRI berdasarkan Pancasila," tandas Gandung, Panglima Gepako.

Jika negara harus meminta maaf kepada keluarga PKI, imbuh Gandung, ini sama halnya telah menyalahkan tindakan yang dilakukan oleh Soeharto yang telah menumpas PKI dari bumi Indonesia.

"Jelas ini tidak benar dan memutar balikkan fakta sejarah. Justru PKI lah yang telah melakukan pelanggaran HAM berat karena telah melakukan pembanta-

ian terhadap para jenderal. Bahkan jauh sebelum itu (1965) tahun 1948, PKI melakukan pembantaian kepada para kyai dan ulama di Madiun serta tempat-tempat lain dengan jumlah korban kebiadaban PKI mencapai ribuan," ungkap Gandung.

Oleh karena itulah, dirinya mendukung penuh upaya judicial review terhadap Inpres Nomor 2 tahun 2023, Keppres Nomor 17 tahun 2022 dan Keppres Nomor 4 tahun 2023 oleh Anak-anak dari Jenderal (Purn) Ahmad Yani. **(Dev)-f**

PPDB Zonasi Perlu Dievaluasi

YOGYA (KR) - Pelaksanaan sistem seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan model zonasi sempat menimbulkan persoalan di sejumlah daerah di Indonesia dan belum menemui titik terang. Hal itu terjadi karena ada beberapa orangtua siswa yang merasa dirugikan dengan adanya kebijakan PPDB model zonasi. Padahal salah satu tujuan awal dari kebijakan PPDB model zonasi adalah untuk pemerataan kualitas pendidikan. Menyikapi kondisi tersebut perlu disikapi secara bijak dan dicarikan solusi terbaik.

"Esensi diterapkannya PPDB berbasis zonasi adalah untuk memberikan ruang dan kesempatan masyarakat usia belajar dapat menempuh pendidikan berkualitas yang ada di sekitar rumahnya. Harapannya terjadi pula pemerataan kualitas peserta didik di seluruh satuan pendidikan," kata Kepala Biro Organisasi dan Kaderisasi PGRI DIY sekaligus Kepala Balai Teknologi Komunikasi

Pendidikan (Balai Tekkomdik) Rudy Prakanto MEng di Yogyakarta, Minggu (16/7).

Rudy mengatakan, persoalan PPDB zonasi menjadi cukup rumit ketika orangtua berusaha untuk memasukkan anaknya ke sekolah tertentu, yang tidak sesuai tempat tinggalnya. Secara regulasi sesuai Permendikbud nomor 1 tahun 2021, sebetulnya sudah jelas syarat untuk PPDB zonasi tersebut.

Secara spesifik evaluasi perlu dilakukan terkait dengan maraknya pelanggaran syarat zonasi. Terutama kartu keluarga yang tidak sesuai kenyataan riil di lapangan. Hal utama adalah pemerintah harus berusaha menjadikan seluruh satuan pendidikan berkualitas.

"Guna mengatasi atau mengurangi terjadinya kecurangan perlu kerjasama antar stakeholders. Seperti Disdukcapil, kalurahan dan kecamatan untuk memastikan otentiknya KK peserta didik sesuai regulasi," ungkapnya. **(Ria)-f**

Kolaborasi Diskop UKM DIY dan Kwarda Pramuka DIY Saka Wirausaha Lahirkan Entrepreneur Muda

YOGYA (KR) - Pembentukan Satuan Karya (Saka) Wirausaha di DIY yang diinisiasi Dinas Koperasi dan UKM DIY dalam Gerakan Pramuka Kwarda DIY sangat mendukung program Pemerintah Daerah. Dalam upaya menciptakan entrepreneur-entrepreneur muda baru. Diharapkan entrepreneur baru ini mampu membuka lapangan kerja di desanya masing-masing.

"Sebelumnya ada pernyataan pekerjaan adanya di kota, bahwa di desa pendukung kota, namun di desa tidak ada pekerjaan. Saya berupaya di desa bisa tumbuh lapangan pekerjaan baru," tegas Gubernur DIY Sri Sultan HB X dalam Talkshow Rembug Desa dalam rangkaian pembukaan Festival Pramuka Jogja (FPJ) Tahun 2023, Sabtu (15/7) di Bumi Perkemahan Taman Tunas Wiguna Babarsari, Catur Tunggal Depok, Sleman.

Talkshow juga menghadirkan Deputy Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) Siti Azizah, Ketua Kwarda DIY GKR Mangkubumi dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM (Diskop UKM) DIY Sri Nurkyatsiwi. "Program 3 tahun lalu Kapaneon Mandiri dan Budaya, sehingga dana keistimewaan masuk di desa, 24 desa untuk percontohan, kini Pramuka bisa menangkap peluang untuk mendukung kewirausahaan," ucap Sultan yang juga Ketua Ma-



KR-Juvinarto

Ketua Kwarda Gerakan Pramuka DIY GKR Mangkubumi melantik Majelis Pembimbing dan Pimpinan Saka Wirausaha Tingkat Daerah DIY

jelis Pembimbing Daerah (KaMabida) Gerakan Pramuka DIY

Disebutkan entrepreneur di desa agar mendapatkan dana keistimewaan dengan Saka Wirausaha dari Pramuka tidak boleh berhenti di jalan, namun menjadi inkubator. "Karena mendapatkan dukungan penuh dari Pemda DIY melalui Dinas Koperasi dan UKM DIY," jelas Sultan.

Senada Siti Azizah menyebutkan untuk bisa menjadi negara maju salah satu syarat adalah jumlah wirausaha mencapai 12 persen, minimal 4 persen. "Sementara itu, saat ini jumlah wirausaha di Indonesia baru mencapai 3,47 persen sehingga berbagai upaya terus dilakukan pemerintah melalui Kemenkop UKM. Di antaranya dengan mencaangkan target mencipta-

kan satu juta wirausaha baru hingga tahun 2024," ujarnya

Diharapkan nantinya bisa memenuhi 3,95 persen jumlah wirausaha sebagai negara maju. "Adanya Saka Wirausaha DIY akan lebih mendorong dan bisa menyumbangkan lebih banyak wirausaha-wirausaha baru di Indonesia. Program Saka Wirausaha DIY ini bisa ditiru daerah lain untuk mendukung terciptanya wirausaha-wirausaha baru di Indonesia," tegasnya

Sedang Kadiskop UKM DIY Sri Nurkyatsiwi menyebutkan saat ini jumlah wirausaha di DIY masih berada di urutan kelima nasional. "Dengan keberadaan Saka Wirausaha Pramuka DIY ini diharapkan bisa mempercepat penciptaan wirausaha baru di Yogyakarta, yang saat ini

sudah ada 13 Saka," ungkapnya.

Dikatakan Diskop UKM DIY menggandeng Pramuka dalam upaya meningkatkan kewirausahaan adalah hal yang tepat. "Pramuka luar biasa tangguh dan tidak mudah menyerah. Dimana dua hal itu adalah unsur semangat ekosistem kewirausahaan. Jiwa entrepreneurship dalam diri anak-anak muda ini dipastikan akan terasah optimal jika diwadahi dan difasilitasi dengan baik," jelasnya

Dalam rangkaian pembukaan FPJ 2023 ini Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY (Kwarda DIY) GKR Mangkubumi melantik Majelis Pembimbing dan Pimpinan Saka Wirausaha Tingkat Daerah. Kadiskop UKM DIY Sri Nurkyatsiwi selaku Ketua Majelis Pembimbing (Mabi) Saka Wirausaha, dan Kepala Bidang (Kabid) Layanan Kewirausahaan Dinas Koperasi UKM DIY Wisnu Hermawan sebagai Pimpinan Saka (Pimsaka) Wirausaha DIY dilantik bersama jajarannya

Sebelumnya 4 pengurus Cabang Saka Wirausaha mulai dari Kwarcab Sleman, Kwarcab Kota Yogyakarta, Kwarcab Bantul, Kwarcab Kulonprogo juga dilantik. "Saka Wirausaha dalam membentuk wirausaha-wirausaha baru di DIY melalui berbagai hal dan berkolaborasi dengan masyarakat yang menjadi program gerakan pramuka," tutur GKR Mangkubumi (Vin)



KR-Juvinarto

Gubernur DIY Sri Sultan HB X menjadi narasumber Talkshow rangkaian pembukaan Festival Pramuka Jogja (FPJ) 2023 bersama Deputy Bidang Kewirausahaan KemenkopUKM Siti Azizah, Ketua Kwarda DIY GKR Mangkubumi dan Kepala Diskop UKM DIY Sri Nurkyatsiwi.

Kapas Asia Prima Ditunjuk Ramaikan Relaunch 3 Produk Baru



YOGYA (KR) - Kapas Asia Prima sebagai perusahaan distribusi ternama di wilayah kerja Yogyakarta ditunjuk oleh PT Tri Jaya Tissue untuk ikut meramaikan acara relaunch 3 produk andalan baru. Semua itu dilakukan guna memenuhi kebutuhan tissue yang berkualitas namun ekonomis secara harga.

"Tiga maskot produk ini sekaligus lahir dan dipasarkan seiring menyambut hari kemerdekaan RI ke-78," kata NSM PT Tri Jaya Tissue, Totok Darmanto di Yogyakarta, Minggu (16/7).

Produk yang ditawarkan meliputi Tissue Green Pop Up 130, Green Facial 160 dan Green Facial 250.

Menurut Totok, keberadaan produk tersebut di-



harapkan bisa memberikan manfaat besar untuk konsumen Yogyakarta. Semua itu tidak lepas dari predikat sebagai kota pelajar, kota kuliner dan kota wisata.

"Rasa terima kasih kami sampaikan untuk para

konsumen yang selama ini sangat loyal menggunakan tissue green. PT Tri Jaya Tissue selaku produsen akan selalu berkomitmen menciptakan inovasi-inovasi terbaru yang lebih baik lagi untuk para pelanggannya," terangnya. **(Ria)**